

**RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KECAMATAN KARANGREJA**

Jalan Raya Karangreja No. (0281) 7700135

PURBALINGGA 53357

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja atau yang dikenal dengan singkatan Renja merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Karangreja Tahun 2021- 2026 yang dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangreja disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan dapat membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Karangreja di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Karangreja.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 di wilayah Kecamatan Karangreja. Adapun keberhasilan Renja Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Karangreja pada tahun-tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2022	
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangreja Tahun 2022	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangreja	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangreja	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGREJA	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangreja	57
3.3. Program dan Kegiatan	60
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGREJA	64
BAB V. PENUTUP	71

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pembangunan daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Karangreja menyusun Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu "**Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhhlak Mulia**", yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

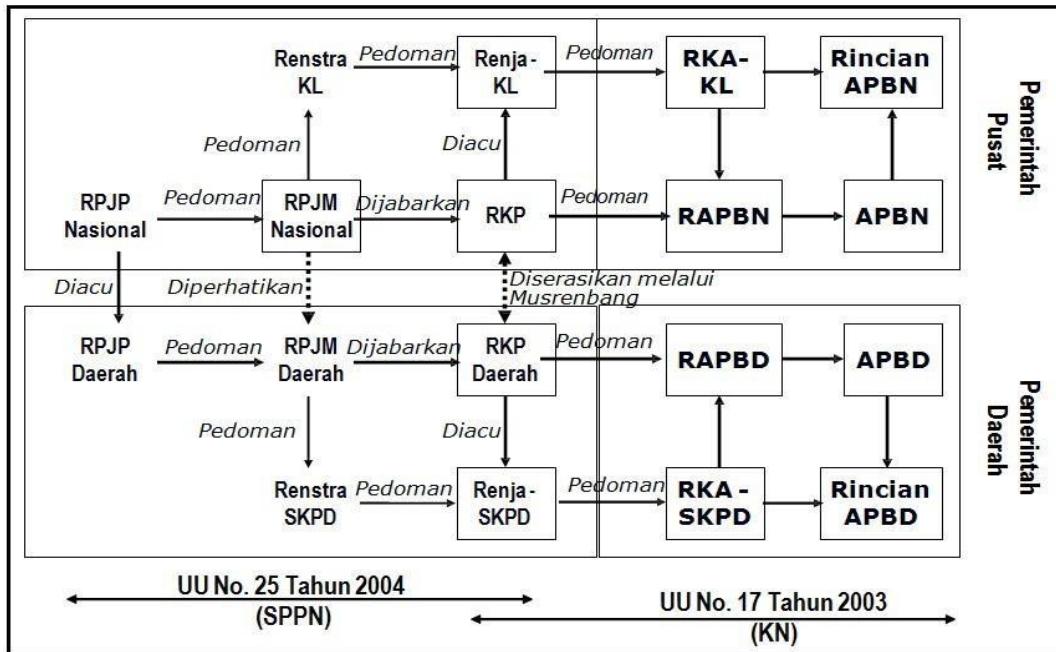
Dari dokumen Rencana Stategic (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Karangreja dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas/fungsi Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, sebagaimana kecamatan merupakan miniaturnya kabupaten, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Karangreja

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangreja Tahun 2025 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan

- Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
36. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja dimaksudkan untuk :

- Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karangreja Tahun 2025.
- Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Karangreja Tahun 2025.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Karangreja Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Karangreja dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2022.

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangreja Tahun 2022;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangreja;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangreja;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangreja

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangreja;
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karangreja**BAB V. PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Karangreja Tahun 2023

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Karangreja, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kantor Kecamatan Karangreja tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangreja tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dan
Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) s/d Tahun 2023
Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGREJA

Lembar :

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Unsur Kewilayah									
		Bidang Urusan Kecamatan									
7	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	NA	NA	100	100	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2 0	0 1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	NA	NA	100	100	100%
7	0 1	0 1	2 0	0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	NA	NA	100	100	100%
7	0 1	0 1	2 0	0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	NA	NA	100	100	100%

7	0 1	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	NA	NA	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	NA	NA	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	NA	NA	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	NA	3,1	4,8	155%	3,4	100%	100%	100%
7	0 2	0 2	2	0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	4 dokumen	4	100%	4 dokumen	100%	100%	100%
7	0 2	0 2	2	0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	NA	NA	16 jenis	16	100%	16 jenis	100%	100%	100%
7	0 3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	NA	NA	100%	97,96	98%	100%	100%	100%	100%
7	0 3	0 3	2	0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasayarakatan (Musrenbangdes)	NA	NA	5 kegiatan	5	100%	5 kegiatan	100%	100%	100%
7	0 4					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	NA	NA	12 dokumen	7	58%	12 dokumen	100%	100%	100%
7	0 4	0 4	2	0 3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	NA	NA	12 kegiatan	12	100%	12 kegiatan	100%	100%	100%

					dan Ketertiban Umum	dan Ketertiban Umum									
7	0 5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	NA	NA	12 dokumen	12		100%	12 dokumen	100%	100%
7	0 5	0 5	2	0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	NA	NA	12 dokumen	12		100%	12 dokumen	100%	100%
7	0 6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	NA	NA	12 dokumen	12		100%	12 dokumen	100%	100%
7	0 6	0 6	2	0 1	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	NA	NA	12 dokumen	12		100%	12 dokumen	100%	100%

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2022 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Karangreja. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangreja.

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangreja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangreja dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman
4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi, maka pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangreja meliputi :

- a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Kecamatan Sesuai SOP
- Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti
- Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan
- Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	12	12	12	12
2	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Persen	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	30 - 44%	30 - 44 %	0%	0%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Karangreja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Forkompimcam secara berkala (setiap bulan)
- Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa
- Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Ormas
- Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan

b. Koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Cakupan Desa/Kelurahan yang melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase keaktifan lembaga desa	Persen	100%	100%	86%	86%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Karangreja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi kepada kepala desa / sekretaris desa dan kasi perencanaan secara berkala;
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan bendahara desa;
- Memfasilitasi kegiatan Musdes dan Musdesus pada 7(tujuh) desa
- Memfasilitasi dokumen pengajuan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) baik propinsi maupun kabupaten
- Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan ADD dan DD
- Review Kegiatan ADD dan DD

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga :

Tabel 2.4
 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Kecamatan Karangreja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021-2026 (TAHUN 2022)	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2022)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
A	INDIKATOR TUJUAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	87				73,02	
B	INDIKATOR SASARAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	87				73,02	
2	Nilai SAKIP Kecamatan	angka					50,66	
C	INDIKATOR PROGRAM							
1.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	50	50	80	99,75	99,75
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	20	30	70	83,58	83,58
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	20	30	30	100	100
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	20	30	80	99,71	99,71
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	20	30	60		
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	20	30	30	97,87	97,87

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021-2026 (TAHUN 2022)	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2022)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1	Nilai evaluasi pelayanan publik	angka	3,10 – 5,00					
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
1	Prosentase keaktifan lembaga desa	persen	100	86	86	86	86	86
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	12	3	5	9	12	12
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
1	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	persen	100	0	49	0	100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	persen	30 - 44	0	0	0	0	0

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangreja

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Karangreja, antara lain :

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

NILAI SAKIP KECAMATAN KARANGREJA

TAHUN 2022

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	20,10
Pengukuran Kinerja	16,20
Pelaporan Kinerja	2,10
Evaluasi Internal	12,25
NILAI TOTAL	50,66

Sumber : Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran

status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 3.2

TABEL STATUS IDM KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2022

NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
KARANGREJA	3303102007	GONDANG	0,8514	0,6	0,6	0,6838	BERKEMBANG
KARANGREJA	3303102006	KARANGREJA	0,8229	0,8833	0,7333	0,8132	MAJU
KARANGREJA	3303102002	KUTABAWA	0,7657	0,8	0,8667	0,8108	MAJU
KARANGREJA	3303102001	SERANG	0,8629	0,7833	0,8667	0,8376	MANDIRI
KARANGREJA	3303102003	SIWARAK	0,7714	0,5667	0,8	0,7127	MAJU
KARANGREJA	3303102005	TLAHAB KIDUL	0,8343	0,7	0,6667	0,7337	MAJU
KARANGREJA	3303102004	TLAHAB LOR	0,8457	0,75	0,8	0,7986	MAJU

Sumber: Data IDM Tahun 2022

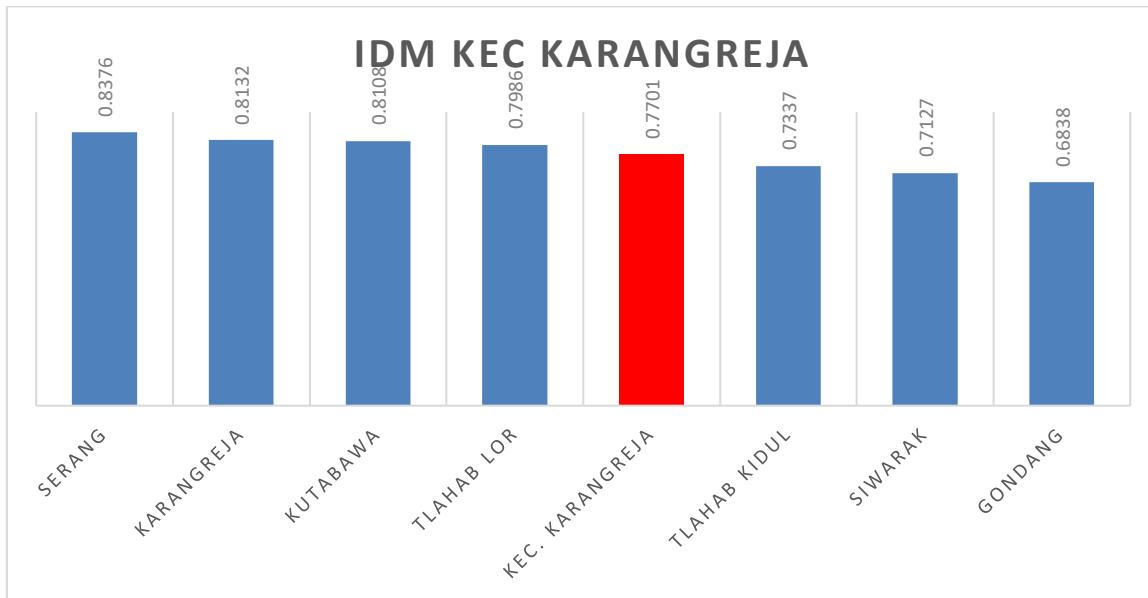
Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Kutabawa, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Siwarak, serta Indeks Lingkungan paling rendah adalah Desa Gondang.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Serang, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Karangreja, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Kutabawa dan Serang.

Terdapat 1 desa berstatus Desa Mandiri yaitu Desa Serang, 5 desa dengan status maju, dan 1 desa berkembang.

Gambar 3.2

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Karangreja Tahun 2022



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Tlahab Kidul, Desa Siwarak, dan Desa Gondang. Sementara 4 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Serang, Desa Karangreja, Desa Kutabawa, dan Desa Tlahab Lor.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Karangreja memiliki 3 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

PROFIL BUMDES KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2022

No .	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Bintang Persadi	Kecamatan Karangreja	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Berkembang	Karangreja
2.	Maju Berkah	Jl. Raya Karangreja rt. 01 rw. 04 Karangreja	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa internet : jasa internet - Jasa : jasa pengelolaan pasar - Wisata : jasa pariwisata - Air bersih : air bersih - Jasa : jasa sewa gantangan burung - Pengelolaan sampah 	Maju	Karangreja
3.	Ngudi Rejo	Desa Tlahab Kidul	<ul style="list-style-type: none"> - Air bersih : pengelolaan air bersih - Persewaan : sewa peralatan - Wisata : wisata 	Tumbuh	Tlahab Kidul, Karangreja
4.	Serang Makmur Sejahtera	Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - air bersih - simpan pinjam - pertanian - peternakan 	Maju	Serang

5.	Makmur	Tlahab Lor	- air bersih - internet - pengelolaan sampah - kios desa (sewa)	Berkembang	Tlahab Lor
6.	Lawa Mas	Siwarak	- air bersih - internet - pengelolaan sampah	Tumbuh	Siwarak
7.	Mitra Raharja	Kutabawa	- Agrobisnis - Perdagangan - Pengelolaan sampah - Pertanian	Tumbuh	Kutabawa
8.	Ngudi Makmur	Gondang	- air bersih - sewa jenset - pertanian	Tumbuh	Gondang

4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

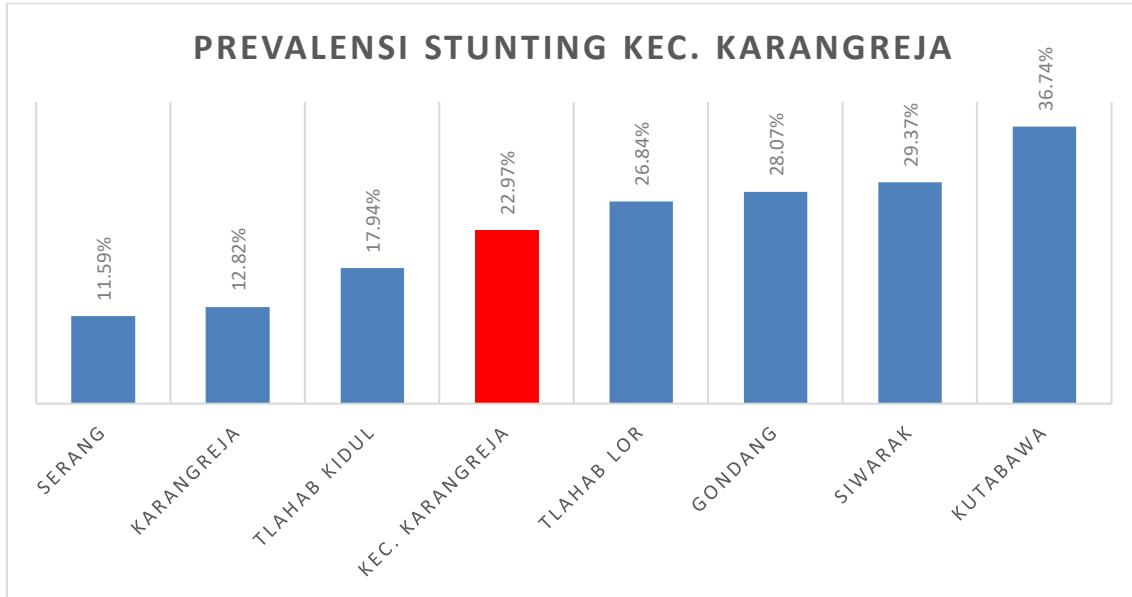
Tabel 3.4

TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2022

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KARANGREJA	2368	157	387	544	22,97%
GONDANG	285	37	43	80	28,07%
KARANGREJA	156	8	12	20	12,82%
KUTABAWA	264	36	61	97	36,74%
SERANG	561	13	52	65	11,59%
SIWARAK	378	37	74	111	29,37%
TLAHAB KIDUL	262	5	42	47	17,94%
TLAHAB LOR	462	21	103	124	26,84%

Gambar 3.3

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KARANGREJA



Gambar 2.x

xxxxxx

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Tlahab Lor, Desa Gondang, Desa Siwarak, dan Desa Kutabawa

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;

5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Karangreja untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

Tabel 3.5
TABEL LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA
1	KARANGREJA	GONDANG
2	KARANGREJA	SIWARAK
3	KARANGREJA	TLAHAB LOR

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin)

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :

- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
246	229	585

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
259	439	25

Pada Kecamatan Karangreja terdapat 246 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 229 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 585 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 259 anak, SMP/SMPLB sejumlah 439 anak, SMA/SMALB sejumlah 24 anak, dan tidak sekolah sejumlah 87 anak.

2.4. Review Terhadap Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Karangreja. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Karangreja yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Karangreja sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pembangunan daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Karangreja baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata.Untuk

lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGREJA

Lembar dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Karangreja	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	1.557.876.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Karangreja	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	1.606.611.000	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	5.508.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	1.624.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	1 dokumen	4.346.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	904.000	ATK, Kertas, Perjadin
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	6 laporan	1.162.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	720.000	ATK, Kertas

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.406.991.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.412.886.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangreja	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	13 Orang/Bulan	1.359.731.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangreja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	1.397.826.000	Gaji dan Tunj
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Karangreja	jumlah kunjungan lapangan/survei/koordinasi/undangan/SPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	11 Dokumen	11.640.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 dokumen	900.000	ATK, Perjadin
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Karangreja	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Dokumen	35.620.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Karangreja	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 dokumen	14.160.000	honor pengelola keu, atk
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karangreja	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	100%	43.610.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karangreja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	74.000.000	BBM Kend dinas, pemel kend dinas,pajak dll
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 bulan	4.650.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	5.000.000	Alat/bahan komputer, pemel komputer, laptop, printer

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Karangreja	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	19.345.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Karangreja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.000.000	Pemel bangunan kantor dan lainnya, pengecatan, perbaikan ruang pkk dll
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	40.020.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	26.735.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karangreja	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	1.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karangreja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	1.056.000	kabel, lampu dll
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Karangreja	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Karangreja	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 paket	16.699.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Karangreja	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Karangreja	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	-	langganan koran
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Karangreja	Tersedianya Jamuan Tamu	60 orang							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karangreja	Tersedianya jamuan Rapat	142 orang	5.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karangreja	Tersedianya jamuan Rapat	100 laporan	3.700.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Karangreja	Tersedianya honor Operator SIMDA, SIM Aset, SIPD	3 OB	7.420.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Karangreja	Tersedianya honor Operator SIMDA, SIM Aset, SIPD	12 dokumen	5.280.000	honor opr
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Karangreja		100%	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Karangreja		100%	1.440.000	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.440.000	Honor pengurus barang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	55.912.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	79.926.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Karangreja	Tersedianya perangko, materai dll	12 bulan							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karangreja	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jas Telekomunikasi	12 bulan	16.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	19.530.000	listrik, internet
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karangreja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	6 jenis	2.000.000						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karangreja	Tersedianya Honor Operator Komputer dan Petugas Kebersihan	3 OB	37.112.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 OB	60.396.000	Honor THL (1 SI, 1 SLTA, Kbrshan), iuran Jkk, JKM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	100%	5.835.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	100%	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis	5.835.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis	-	mesin scaner
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec. Karangreja	tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima pada masyarakat								

						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karang reja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	kend dinas trail
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karang reja	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,1	42.152.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karang reja	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,1	85.490.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karang reja	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	39.800.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karang reja	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	84.850.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karang reja	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	26 kegiatan	39.800.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karang reja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26 keg	84.850.000	ATK, Kertas, bahan komp, makmin rapat, perjadin
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Karang reja	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	16 jenis	2.352.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Karang reja	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	16 jenis	640.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karang reja	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	2.352.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan NonPerizinan	Kec. Karang reja	Jumlah Pelayanan Paten bersifat nonperizinan yg dialayani	12 dokumen	640.000	Atk dll
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karang reja	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	80.726.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karang reja	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	51.645.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Karang reja	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	5 kegiatan	80.726.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Karang reja	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	5 kegiatan	51.645.000	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karang reja	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	7 desa	40.726.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karangreja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga keasyarkatan	5.600.000	ATK, bahan komp, makmin rapat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang reja	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	7 desa	40.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	46.045.000	makmin, perjadin, pkk,
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karang reja	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	60.365.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karangreja	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	28.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karang reja	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	60.365.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangreja	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	28.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang reja	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	45.365.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	24.000.000	ATK, makmin rapat, honor forkopimcam
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Karang reja	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	15.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 keg	4.000.000	makmin rapat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kec. Karang reja	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	12 dokumen	48.259.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kec. Karangreja	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	12 dokumen	28.285.000	

	UMUM					UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Karang reja	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dokumen	48.259.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dokumen	28.285.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Karang reja	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	48.259.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Karangreja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4 keg	28.285.000	ATK, kaos paskibra dll,makmin, honorarium,sawa
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Karang reja	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	10.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Karangreja	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	-	
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Karang reja	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	10.000.000	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Karangreja	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	-	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Karang reja	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	7 desa	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 desa	-	ATK, makmin, honorarium, perjadin
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa Tlahab Kidul	Jumlah Desa yang Melaksanakan PILKADES		-						

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Karangreja juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilih dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilih berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Karangreja pada tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkopimcam, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten

Purbalingga “**Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhhlak Mulia**”. maka usulan Program dan Kegiatan masyarakat perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu Kecamatan Karangreja Tahun 2025 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 KECAMATAN KARANGREJA

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA
1	Pembangunan Jalan Karangreja (Gondang) - Karangjambu	kondisi jalan ada yang patah, Mobilisasi padat	Desa Gondang	Gondang
2	Jalan Siwarak - Tlahab Lor (cumbut)	675m jalan belum selesai, Alternatif melewati jalur Bayeman	Desa Siwarak - Tlahab Lor	Tlahab Lor
3	Gapura batas masuk Purbalingga, Pemeliharaan Trotoar	belum adanya icon masuk Kab Purbalingga wilayah utara	Desa Karangreja	Karangreja
4	Warning Light dan Rambu lalu lintas	Merupakan jalan provinsi yang intensitas mobilitas padat dan sering terjadi kecelakaan	Dekan Kantor Kecamatan Karangreja	Karangreja
5	Pemeliharaan Rumah Dinas Camat	Lantai rusak, banyak toilet	Komplek Kantor Kecamatan Karangreja	Karangreja
6	Rehabilitasi lahan pertanian /Penguatan ketahanan pangan desa	Pasca longsor kerusakan akibat bencana, sekitar 15ha masih terbengkelai, batas-batas kepemilikan lahan hilang	Desa Siwarak - Tlahab Lor	Tlahab Lor
7	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Kurangnya alat pertanian yang memadai	Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
8	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung Balai Desa saat ini sudah tidak layak digunakan	Desa Serang RT 03 RW 04, Kab. Purbalingga	Serang
9	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	kurangnya koleksi buku dan literasi di Perpustakaan Desa Serang	Serang RT 03 RW 04, Kab. Purbalingga	Serang

10	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Masyarakat butuh keterampilan untuk meningkatkan taraf ekonomi	Dusun IV Bayeman Kidul RT 001 RW 010 Desa tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
11	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan tembus Tlahab Kidul-Gondang Rusak Berat, sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat	Desa Tlahab Kidul RT 05 RW 04 , Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
12	Pembangunan jalan kabupaten	Pelebaran jalan tahun 2020, namun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut. sementara kondisi jalan sudah rusak parah dan membahayakan pengguna jalan. jika hujan lebat tebing sisi jalan longsor mengakibatkan banjir dirumah warga sekitar jalan tersebut	Desa Serang Dusun IV s/d Dusun V, Kab. Purbalingga	Serang
13	Pelatihan pengelolaan persampahan	Masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang penanganan sampah	Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
14	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Balai Desa yang ada sudah rusak dan kekurangan ruang	Jalan lingkar Lapang No. 08 Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Kode Pos 53357, Kab. Purbalingga	Kutabawa
15	Pembangunan jembatan kabupaten	Jembatan terlalu sempit dan rusak. sangat membahayakan pengguna jalan	Desa Serang RT 02 RW 07 Dusun V, Kab. Purbalingga	Serang
16	Penanganan persampahan skala desa	Tidak memiliki alat pengolahan sampah yang memadai	Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
17	Pemeliharaan jembatan kabupaten	Jembatan dalam keadaan rusak terutama untuk bagian pagar pengaman jembatan.	Tlahab Kidul RT 01 RW 01, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul

18	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jutu jides)	Belum ada tindak lanjut setelah kegiatan TMMD Th 2020. kondisi jalan malah semakin parah dan tidak bisa dilewati kendaraan	Desa Serang RT 01 RW 04, Kab. Purbalingga	Serang
19	Pembangunan PKD	Belum adanya gedung PKD di Desa	Rt 004 Rw 001 Dusun Pejagan 2 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
20	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Di Desa Serang belum memiliki fasilitas gedung olahraga	Desa Serang RT 03 RW 04, Kab. Purbalingga	Serang
21	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Saluran drainase yang ada sudah tidak layak, karena banyak yang rusak dan tidak bisa menampung debit air secara maksimal	Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
22	Pembangunan talud jalan kabupaten	Talud Jalan Kabupaten Rusak berat, yang menyebabkan jalan longsor	Tlahab Kidul RT 05 RW 05, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
23	Pemeliharaan jalan poros desa	Jalan penghubung antara Desa Serang dan Pengalusian yang sudah rusak	Desa Serang Dusun I, Kab. Purbalingga	Serang
24	Pelatihan kelembagaan desa	Peningkatan kapasitas LINMAS	Desa Serang, Kab. Purbalingga	Serang
25	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jutu jides)	Jalan usaha tani yang ada masih belum memadai (baru Makadam)	Rt 008 Rw 003 Dusun II Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
26	Penyuluhan dan pelatihan bidang pemuda	Peningkatan kapasitas Karang Taruna	Desa Serang, Kab. Purbalingga	Serang
27	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jutu jides)	Jalan yang ada belum memadai (baru makadam)	Rt 013 Rw 003 Dusun II Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
28	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	desa belum memiliki peralatan olahraga	Desa Serang, Kab. Purbalingga	Serang
29	Pembangunan jalan kabupaten	akses jalan kabupaten dari Tlahab Lor ke siwarak yang melewati Dukuh Cumbut belum terselesaikan, masih ada kurang lebih 1 km	Dusun III Penariban Dukuh Cumbut RT 005 RW 008 Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
30	Penyuluhan dan pelatihan bidang pariwisata	Penguatan Kelembagaan POKDARWIS	Desa Serang, Kab. Purbalingga	Serang

31	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Jalan Dusun III dan Dusun II belum terdapat penerangan	Dusun III dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Karangreja
32	Pelatihan kelembagaan desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Serang, Kab. Purbalingga	Serang
33	Pengadaan alat kesehatan	Tidak memiliki alat transportasi kesehatan (Mobil Siaga)	Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
34	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	minimnya pengetahuan tentang perbengkelan bagi montir di RW 02 Dusun I Desa Serang	Desa Serang RW 02 Dusun I, Kab. Purbalingga	Serang
35	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jutut jides)	melanjutkan pembangunan jalan yang belum selesai pada jalan Usaha Tani	Dusun II , Kab. Purbalingga	Karangreja
36	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah buah nanas. dan belum tersedianya peralatan yang memadai	Desa Serang RW 01 Dusun I, Kab. Purbalingga	Serang
37	Pembangunan jembatan kabupaten	Jembatan yang ada rusak berat terutama pada penopang jembatan dan pagar pembatas yang sangat membahayakan	Tlahab Kidul RT 01 RW 05, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
38	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Drainase yang ada sudah rusak dan mengakibatkan tanah tergerus	Rt 008, 009, 010 Rw 003 Dusun II, Rt 004 Rw 001 Dusun III, Rt 005, 007 Rw 002 Dusun I, Kab. Purbalingga	Kutabawa
39	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Bak Intake dan Pipa Jaringan PAMSIMAS hilang terbawa banjir bandang (Bencana Alam)	Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
40	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Perlunya pengembangan pengetahuan bagi pengrajin kayu dan besi	Desa Serang Dusun II, Kab. Purbalingga	Serang
41	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih terdapat banyak rumah tidak layak huni yang harus segera di rehabilitasi	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
42	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	minimnya penjahit di desa serang	Desa Serang Dusun II, Kab. Purbalingga	Serang

43	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Kurangnya lampu penerangan jalan di ruas-ruas jalan desa	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
44	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Potensi wisata budidaya tanaman hias tinggi, tetapi skill warga tentang budidaya tanaman hias masih sangat minim	Desa Serang Dusun III RW 05, Kab. Purbalingga	Serang
45	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Belum adanya drainase mengakibatkan air naik ke jalan dan rumah warga	Rt 002 Rw 001 Dusun III, Rt 014, 015, 016 Rw 004 Dusun IV Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
46	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Kurangnya modal peternakan kambing	Desa Serang Dusun IV RW 06, Kab. Purbalingga	Serang
47	Pengadaan alat kesehatan	Belum tersedianya alat transportasi kesehatan (Mobil Siaga)	Desa Serang, Kab. Purbalingga	Serang
48	Pelatihan pengelolaan persampahan	Sampah menjadi permasalahan klasik yang ada di desa, sehingga perlu diadakan pelatihan sistem pengelolaan sampah	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
49	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	masih ada titik jalan yang belum ada penerangannya	Desa Serang Dusun I, Kab. Purbalingga	Serang
50	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Belum mempunyai fasilitas Gedung PKK	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
51	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih adanya rumah yang belum layak	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
52	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Dalam memberdayakan masyarakat untuk melestarikan budaya, masih menggunakan gamelan pinjaman dari kecamatan.	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
53	Pelatihan pengelolaan persampahan	Sudah memiliki gedung TPS3R namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas tim pengelola persampahan	Desa Serang Dusun III, Kab. Purbalingga	Serang
54	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Belum mempunyai Gedung Sarana Olah raga	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul

55	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Belum ada penunjuk arah lokasi Homestay agar keberadaan Homestay di Desa Siwarak guna menunjang Wisata	DUSUN IV RT 02 RW 07, Kab. Purbalingga	Siwarak
56	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Membahayakan bagi pengguna jalan di malam hari karena belum adanya lampu penerangan jalan	Rt 008, 009, 010 Rw 003 Dusun II, Rt 005, 007 Rw 002 Dusun I, Rt 004 Rw 001 Dusun III, Kab. Purbalingga	Kutabawa
57	Pelatihan kelembagaan desa	Kurangnya Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan desa	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
58	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Sudah ada Embrio Perpustakaan, Gedung dan Fasilitas penunjang Belum ada.	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
59	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Togor yang ada sudah rusak dan kepadatan penduduk meningkat	Rt 008, 009, 010 Rw 003 Dusun II, Kab. Purbalingga	Kutabawa
60	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung Kantor Desa Rusak Berat	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
61	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Kondisi lapangan yang sekarang belum memadai /standart fasilitas olahraga	DUSUN I RW 05, Kab. Purbalingga	Siwarak
62	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Masih Kurangnya Fasilitas Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
63	Pembangunan jalan kabupaten	kondisi jalan rusak membahayakan buat pengguna jalan	Dusun I RT 1,2,3,4,5,6 RW 05, Kab. Purbalingga	Siwarak
64	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Pembangunan Green House untuk meningkatkan wisata pertanian dan edukasi	Rt 007 Rw 002 Dusun I, Rt 001 Rw 001 Dusun III, Kab. Purbalingga	Kutabawa
65	Pelatihan pengelolaan persampahan	kurangnya pengetahuan pengelola tentang pengolahan sampah	Dusun II, Kab. Purbalingga	Karangreja
66	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Pembangunan Tribun dan Pagar keliling Lapang Kuncup Mekar Desa Kutabawa	Rt 007 Rw 002 Dusun I Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
67	Pelatihan kearsipan desa	kurangnya pengetahuan tentang pengarsipan desa	Dusun I, Kab. Purbalingga	Karangreja

68	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Kondisi saat ini TPQ Alhidayah kurang memadai menginggat santriwan santriwati yang semakin bertambah	Dusun IV Rw 08, Kab. Purbalingga	Siwarak
69	Pembangunan DAM	DAM parit Blok sipane rusak berat karena diterjang banjir	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
70	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Untuk mengarahkan bakat pemuda di kesenian budaya	Desa kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
71	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Kurangnya ruang kelas santri	Rt 002 Rw 001 Dusun III, Kab. Purbalingga	Kutabawa
72	Pemeliharaan jalan poros desa	kondisi jalan aspal di wilayah sidadadi sangat membahayakan bagi pengendara mengingat saat ini kondisi rusak	Dusun I Rw 01 dan RW 02, Kab. Purbalingga	Siwarak
73	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jutu jides)	jalan licin masih tanah susah dilalui dan jalan yang bisa digunakan untuk akses jalan wisata	RT 01 RW 05, Kab. Purbalingga	Karangreja
74	Pemeliharaan jalan poros desa	jalan licin beresiko untuk pengguna jalan	Dusun II RT 04 RW 05 ke Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Karangreja
75	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Atap Gedung TPQ sudah banyak yang bocor dan kurangnya meubelair yang memadai	Dusun III Penariban RT 002 RW 006 Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
76	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Kantor Desa/Balai Desa Gondang sudah dalam kondisi yang sangat rusak dan memprihatinkan, dan membutuhkan rehabilitasi agar pelayanan masyarakat maksimal	Jl. Gondang - Sirandu RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
77	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	mengingat masyarakat Desa Siwarak mayoritas petani dan sangat membutuhkan pupuk dan alat pertanian	Dusun IV RW 08, Kab. Purbalingga	Siwarak

78	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Rehabilitasi Jalan/Peningkatan Jalan RT 008 RW 001 karena jalan alternatif desa ini kondisinya sangat rusak dan butuh sekali untuk direhabilitasi	RT 008 RW 001, Kab. Purbalingga	Gondang
79	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Kurang tempat kelas belajar	Dusun I, Kab. Purbalingga	Karangreja
80	Pembangunan ruang kelas/Gedung Penunjang SD/MI	Membutuhkan ruang kelas baru dikarenakan harus sudah paralel	Jl. Gondang - Sirandu RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
81	Pemeliharaan jalan poros desa	mengingat kondisi jalan anrat desa siwarak ke tlahab lor sangat rusak dan kurang memadai	Dusun I RW 01, Kab. Purbalingga	Siwarak
82	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Drainase Depan Balai Desa Gondang sering Mampet dan air masuk ke jalan PEMDA, dan mengakibatkan air masuk ke rumah warga	Jl. Gondang - Sirandu RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
83	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	Talud Makam tergerus aliran air dari pemukiman warga, dimungkinkan kuburan disebelah talud terbawa aliran air	Jl. Gondang Sirandu RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
84	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	belum ada penghubung ke akses wisata	Reat Area Dusun II, Kab. Purbalingga	Karangreja
85	Revitalisasi makam desa	Belum ada pengaman (Talud) di keliling tanah makam	Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
86	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Jalan di RT 006 RW 002 sudah sangat rusak berat dan tidak dapat dilalui motor roda 2 maupun roda 4	RT 001 RW 002, Kab. Purbalingga	Gondang
87	Penanganan persampahan skala desa	belum tertangani permasalahan sampah per Wilayah RT	Dusn I,II,III, Kab. Purbalingga	Karangreja
88	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jutu jides)	Jalan Usaha Tani di RW 03 alternatif ke Desa Purbasari sudah rusak berat dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2	Jl. Gondang - Purbasari RW 03, Kab. Purbalingga	Gondang

89	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Jalan Rusak dan butuh rehabilitasi	RT 003 RW 002, Kab. Purbalingga	Gondang
90	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Jalan Desa Rusak dan butuh rehabilitasi	RT 006 RW 002, Kab. Purbalingga	Gondang
91	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	aliran air diwilayah tersebut belum ada sarana yang terarah atau memadai	Dusun II, Kab. Purbalingga	Karangreja
92	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jutu jides)	Pembangunan Baru Jalan Usaha Tani RW 003 untuk mempermudah distribusi pertanian	RW 03, Kab. Purbalingga	Gondang
93	Penanganan persampahan skala desa	dibutuhkan pelatihan penanganan persampahan dan bantuan sara prasarana pengelolaan sampah	Desa Siwarak, Kab. Purbalingga	Siwarak
94	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Jalan Desa untuk akses antar RW Rusak dan butuh rehabilitasi	Jl. Gondang Waringin Kembar, Kab. Purbalingga	Gondang
95	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Sering terjadi tanah longsor di kawasan RT 007 s/d RT 008 RW 001	RT 007 RW 008 RW 001, Kab. Purbalingga	Gondang
96	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan masih licin untuk menghindari kecelakaan	Dusun I, Kab. Purbalingga	Karangreja
97	Pembangunan talud jalan kabupaten	Sering terjadi tanah longsor di daerah RT 003 RW 001	RT 003 RW 001, Kab. Purbalingga	Gondang
98	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	jalan sudah rusak dan resiko bagi pengguna jalan	Dusun III, Kab. Purbalingga	Karangreja
99	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	untuk penahan pergeseran atau pergerakan tanah	Dusun I, Kab. Purbalingga	Karangreja
100	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Tanda Masuk ke kawasan Desa Gondang belum ada	Jl. Gondang, Kab. Purbalingga	Gondang
101	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Banyaknya peternak kambing dan potensi budidaya kambing di Desa Gondang	Jl Gondang, Kab. Purbalingga	Gondang
102	Penanganan persampahan skala desa	dibutuhkan sekali Tempat Pengolahan Sampah Desa karena kebiasaan sampah membuang sampah di sungai	Jl Gondang, Kab. Purbalingga	Gondang

103	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Banyak UMKM Belum berkembang	Jl Gondang, Kab. Purbalingga	Gondang
104	Pelatihan kelembagaan desa	Pelatihan Peternakan / Petani ternak	Jl. Gondang, Kab. Purbalingga	Gondang
105	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	kurangnya fasilitas yang memadai di wisata agro desa gondang	Jl. Gondang - Purbasari RW 03, Kab. Purbalingga	Gondang
106	Pengadaan alat kesehatan	Butuh sekali mobil siaga desa, untuk mobilisasi warga masyarakat yang membutuhkan	Jl. Gondang, Kab. Purbalingga	Gondang
107	Pembangunan jalan kabupaten	Jalan Kabupaten terdapat Patahan antara desa gondang dan karangreja dan mengakibatkan banyaknya Lakalantas, dan jalan kabupaten menuju desa sirandu kondisinya sangat memprihatinkan karena aspal sudah mulai mengelupas dan banyak lubang dan kurang lebaranya jalan membuat jalan terasa sempit untuk kendaraan angkutan.	Jl. Gondang - Sirandu, Kab. Purbalingga	Gondang
108	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Masih kurangnya optimalisasi penunjang baik sarana dan prasarana lembaga desa	Jl Gondang - Sirandu RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
109	Normalisasi sungai	Banyaknya warga masyarakat membuang sampah di sungai, dan hilangnya embrio ikan endemik yang semakin hilang, maka dibutuhkan deforestasi sungai dan revitalisasi sungai dari hulu ke hilir.	Gondang, Kab. Purbalingga	Gondang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGREJA

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu **“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhhlak Mulia”**.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembangunan daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, memasuki pelaksanaan **Tahap Kedua** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan **Tahap Kedua** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diarahkan untuk ***“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”***.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - i. Sekretariat Daerah;

- ii. Sekretariat DPRD;
 - iii. Inspektorat;
 - iv. Dinas;
 - v. Badan dan
 - vi. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
 3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
 4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
 5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatandan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- I.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- I.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - a. Pengadaan Meubelair;
- I.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- I.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- II.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- II.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- III.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- IV.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

- V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

VI. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangreja.

Rencana Program dan kegiatan prioritas Kecamatan Karangreja merupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan Isu-isu penting serta memperhatikan RKP, RKPD Provinsidan RKPD Kabupaten Purbalingga, dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan, sekaligus menjadi acuan bagi PD Kecamatan Karangreja dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Karangreja yang definitif. Adapun Target Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Tujuan / Sasaran Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			87	87	88	89	83,93			
A.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan			62	64	66	68	50,66		70	70
1	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100	100	100	100	90	90	90	90
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah)			100	100	100	100	NA	90	90	90
4	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100
5	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100

7	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			100	100	100	100	100	93	93	93
B	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan			86	87	88	89	83,93			
1	Nilai evaluasi pelayanan publik			NA	3,1	3,2	3,5	4,8		3,2	3,5
2	Prosentase keaktifan Lembaga Desa			100	100	100	100	86	90	90	90
3	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan			12	12	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100	97	97	97	97
5	Cakupan desa uang melaksanakan tertib administrasi			NA	28	35	40	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Karangreja merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangreja selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karangreja.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnikratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Karangreja Tahun Anggaran 2023, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Lapangan;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGREJA

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Karangreja merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangreja selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karangreja.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2021, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

6. Pendekatan Teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
7. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
8. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya;
9. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
10. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 mengacu pada DPA Tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya mengenai Perbandingan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Karangreja dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.1 diisi sesuai hasil analisis yaa
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGREJA

Lembar : dari

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Unsur Kewilayahan								
			Bidang Urusan Kecamatan								
7	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Kec. Karangreja	100%	1.606.611.000	DAU APBD		100%	1.511.885.000
7	0 1	0 1	2 0	0 1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Kec. Karangreja	100%	1.624.000	DAU APBD	
7	0 1	0 1	2 0	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Kec. Karangreja	2 dokumen	904.000	DAU APBD	
7	0 1	0 1	2 0	0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	Kec. Karangreja	6 dokumen	720.000	DAU APBD	
										6 dokumen	720.000

7	0 1	0 1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	Kec. Karangreja	100%	1.412.886.000	DAU APBD		100%	1.319.456.000
7	0 1	0 1	2	0 2	0 3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	Kec. Karangreja	11 Orang	1.397.826.000	DAU APBD		11 Orang	1.304.396.000
7	0 1	0 1	2	0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kunjungan lapangan/survei/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Kec. Karangreja	11 Orang	900.000	DAU APBD		11 Orang	900.000
7	0 1	0 1	2	0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
7	0 1	0 1	2	0 2	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
7	0 1	0 1	2	0 2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	Kec. Karangreja	12 bulan	14.160.000	DAU APBD		12 bulan	14.160.000
7	0 1	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	Kec. Karangreja	100%	84.000.000	DAU APBD		100%	84.000.000
7	0 1	0 1	2	0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Karangreja	12 unit	74.000.000	DAU APBD		12 unit	74.000.000
7	0 1	0 1	2	0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Kec. Karangreja	12 bulan	5.000.000	DAU APBD		12 bulan	5.000.000
7	0 1	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Karangreja	1 paket	5.000.000	DAU APBD		1 paket	5.000.000
7	0 1	0 1	2			Administrasi Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kec. Karangreja	100%	1.440.000	DAU APBD		100%	144.000
7	0 1	0 1	2	0 6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpeliharanya milik daerah	Kec. Karangreja	12 bulan	1.440.000	DAU APBD		12 bulan	144.000
7	0 1	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional	Kec. Karangreja	100%	26.735.000	DAU APBD		100%	26.735.000

kantor														
7	0 1	0 1	2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Karangreja	12 bulan	1.056.000	DAU APBD		12 bulan	1.056.000
7	0 1	0 1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Karangreja	12 bulan	16.699.000	DAU APBD		12 bulan	16.699.000
7	0 1	0 1	2	0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-	DAU APBD		12 bulan	-
7	0 1	0 1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan Rapat	Kec. Karangreja	142 orang	3.700.000	DAU APBD		142 orang	3.700.000
7	0 1	0 1	2	0 6	0 9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD	Tersedianya honor Operator SIMDA, SIM Aset, SIPD	Kec. Karangreja	3 OB	5.280.000	DAU APBD		3 OB	5.280.000
7	0 1	0 1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	Kec. Karangreja		-				
7	0 1	0 1	2	0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Karangreja	1 jenis	-	DAU APBD			
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Karangreja	1 unit	-	DAU APBD			
7	0 1	0 1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kec. Karangreja	100%	79.926.000	DAU APBD		100%	79.926.000
7	0 1	0 1	2	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jas Telekomunikasi	Kec. Karangreja	12 bulan	19.530.000	DAU APBD		12 bulan	19.530.000
7	0 1	0 1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Operator Komputer dan Petugas Kebersihan	Kec. Karangreja	3 OB	60.396.000	DAU APBD		3 OB	60.396.000
7	0 2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Kec. Karangreja	3,1	85.490.000	DAU APBD		3,1	85.490.000

7	0 2	0 2	2	0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangreja	4 dokumen	84.850.000	DAU APBD		4 dokumen	84.850.000
7	0 2	0 2	2	0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kec. Karangreja	26 kegiatan	84.850.000	DAU APBD		26 kegiatan	84.850.000
7	0 2	0 2	2	0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	Kec. Karangreja	16 jenis	640.000	DAU APBD		16 jenis	640.000
7	0 2	0 2	2	0 4	0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat Nonperizinan	Kec. Karangreja	12 dokumen	640.000	DAU APBD		12 dokumen	640.000
7	0 3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	Kec. Karangreja	100	51.645.000	DAU APBD		100	32.285.000
7	0 3	0 3	2	0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	Kec. Karangreja	5 kegiatan	51.645.000	DAU APBD		5 kegiatan	32.285.000
7	0 3	0 3	2	0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	Kec. Karangreja	7 desa	5.600.000	DAU APBD		7 desa	5.600.000
7	0 3	0 3	2	0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Karangreja	7 desa	46.045.000	DAU APBD		7 desa	26.685.000
7	0 4					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kec. Karangreja	12 dokumen	28.000.000	DAU APBD		12 dokumen	28.000.000
7	0 4	0 4	2	0 3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangreja	12 kegiatan	28.000.000	DAU APBD		12 kegiatan	28.000.000
7	0 4	0 4	2	0 3	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	Kec. Karangreja	12 kegiatan	24.000.000	DAU APBD		12 kegiatan	24.000.000

							Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	0 4	0 4	2	0 3	0 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Karangreja	4 kegiatan	4.000.000	DAU APBD		4 kegiatan	4.000.000
7	0 5					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	Kec. Karangreja	12 dokumen	28.285.000	DAU APBD		12 dokumen	28.284.800
7	0 5	0 5	2	0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	Kec. Karangreja	12 dokumen	28.285.000	DAU APBD		12 dokumen	28.284.800
7	0 5	0 5	2	0 1	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kec. Karangreja	4 kegiatan	28.285.000	DAU APBD		4 kegiatan	28.284.800
7	0 6					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	Kec. Karangreja	28%	-	DAU APBD		28%	-
7	0 6	0 6	2	0 1		Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	Kec. Karangreja	28%	-	DAU APBD		28%	-
7	0 6	0 6	2	0 1	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	Kec. Karangreja	7 desa	-	DAU APBD		7 desa	-

1.800.031.000

1.685.944.800

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangreja Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangreja pada Tahun 2025.

Kecamatan Karangreja sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangreja Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2025.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Karangreja dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Karangreja.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhhlak Mulia. Aamin.



KARSENO, S.Sos
Pembina
NIP. 19700910 199103 1 006

TAMBAHKAN LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN KECAMATAN KARANGREJA

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI								Rencana Tindak Pengendalian			
			Risiko		Sebab		C/U/C	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan												
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Banyak penerima pelayanan tidak mengisi Form survey IKM	RS001	Camat	Belum memahami arti pentingnya survey pelayanan kecamatan	Eksternal dan Internal	UC	Nilai hasil survey tidak valid	Kecamatan dan Kabupaten	4	4	16	Membuat aplikasi yang memudahkan penerima pelayanan mengisi survey
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Pelayanan publik Kecamatan Kemangkon												
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan												
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan tidak disusun secara lengkap	RO01	Kasi Pemtrantibum	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	4	3	12	- menyusun notulensi pada setiap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan												
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pekayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan	Lambatnya pelayanan dalam menerbitkan dokumen non perizinan	RO02	Kasi Pemtrantibum	Budaya kerja SDM pelayanan dikecamatan kurang prima	Internal	C	Pelayanan Masyarakat kurang maksimal	Instansi Kecamatan dan warga masyarakat penerima pelayanan	4	3	12	- membuat inovasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Keakifilan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkon												
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemsyarikatan												
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemsyarikatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Beberapa usulan desa tidak tersampaikan	RO03	Kasi PMD	Adanya aplikasi baru yang membuat banyak warga kesulitan untuk mengajukan usulan	Eksternal	UC	Usulan tidak menjadi prioritas di kecamatan maupun kabupaten	Desa dan Kecamatan	3	4	12	- melakukan pendampingan pada saat musdes sampai musrenbang kabupaten
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Keterimbangan laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	RO04	Kasi PMD, Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Desa dan Kecamatan	3	4	12	Menyusun dokumen laporan segera setelah pelaksanaan kegiatan

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan											
	Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum											
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentraman yang tidak terpantau oleh kecamatan	RO05	Kasi Pemrantibum	Kurang pahamnya warga masyarakat terhadap alur pengaduan gangguan trantibum	Eksternal	C	Permasalahan warga tidak segera tertangani	Warga dan Instansi Kecamatan	3	4	12 - Melakukan patroli lingkungan dan sosialisasi secara periodik	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	RO06	Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	3	4	Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk segera melaporkan apabila ada kegiatan Keagaman dan Kemasyarakatan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan											
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan potensi konflik											
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	RO07	Kasi Pemrantibum	Belum terkonsep dengan baik kegiatan pembinaan dan persatuan	Internal	C	Peserta pembinaan tidak bisa menjadi agen perubahan di masyarakat	warga dan instansi Kecamatan	4	3	12 - Mematangkan konsep pembinaan yang akan dilakukan	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi											
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi											
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	RO08	Kasi Pemrantibum	Ada desa yang belum menyadari pentingnya administrasi tata pemerintahan desa	Eksternal	C	Menghambat pelaksanaan kegiatan desa	Desa dan Instansi Kecamatan	3	4	12 - monitoring administrasi pemerintahan desa secara intensif	

CAMAT KARANGREJA

KARSENO, S.Sos
NIP. 19700910 199103 1 006

LAMPIRAN 2

**MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY
Tahun 2025**

BARIS 1	Provinsi	Jawa Tengah
	OPD	Kecamatan Karangreja
	Urusan yang diampu	7.01 Kecamatan
	Nama Program	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Nama Kegiatan	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Nama Sub Kegiatan	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub Kegiatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penduduk kecamatan Karangreja sebanyak 42.663 jiwa, dengan rincian Laki-laki 21.284 jiwa dan Perempuan 21.379 jiwa (<i>sumber Kab. Purbalingga dalam angka 2019</i>) ▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Karangreja rata-rata 26 % dari total peserta. ▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Karangreja yang berasal dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya rata-rata sebesar 30% ▪ Usulan yang diprioritaskan /diusulkan melalui musrenbang Desa/Kecamatan didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project (dapat dilihat) dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender

BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aksesibilitas dalam Musrenbang kecamatan relative terbatas ▪ Partisipasi dalam Musrenbang relative terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki ▪ Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas ▪ Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. ▪ Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang kecamatan.
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kurang memahami konsep gender ▪ Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waktu pelaksanaan Musrenbang yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasanya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksanakan kegiatan rumah tangga ▪ Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga

			mendominasi pengambilan kebijakan.
BARIS 4	Tujuan Sub Kegiatan Responsif Gender		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan keberpihakan terhadap perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya secara spesifik
BARIS 5	Rencana Aksi Uraikan rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukan dalam RKA		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
BARIS 6	Baseline Data		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peserta Perempuan dari utusan desa sebanyak 14 orang dari total 54 orang ▪ Peserta Musrenbang tingkat Kecamatan yang berasal dari unsur Perempuan , anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebanyak 14 orang dari total 54 orang total peserta ▪ 90% Usulan Masyarakat dalam Musrenbang kecamatan merupakan kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output (Sub Kegiatan)	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam

		Musrenbang
		<p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 Lembaga ▪ 14 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya
	Immediate Outcome (Kegiatan)	<p>Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Target Kinerja: 100%</p>
	Intermediately Outcome (Program)	<p>Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan</p> <p>Target Kinerja: 100%</p>
	Ultimate Outcome (Sasaran)	<p>Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan</p> <p>Target Kinerja: 88</p>
	Impact (Tujuan)	<p>Indikator Kinerja: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Target Kinerja: 88</p>



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KARANGREJA

Jalan Raya Karangreja Telepon (0281) 7700135 Kode Pos 53357

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Tahun 2025

Nama OPD : Kecamatan Karangreja
Urusan Yang Diampu : 7.01. Kecamatan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran : 2025

Program	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	7. 01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Analisis Situasi	<p>Kecamatan Karangreja mengalami beberapa perubahan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peserta Musrenbang di tiap tingkatan/level lebih banyak didominasi oleh laki-laki, meskipun telah ditetapkan dalam pelaksanaan musrenbang wajib mengikutsertakan utusan/perwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya• Peserta Perempuan dalam Musrenbang di wilayah rata-rata 26 % dari 54 peserta.• Usulan yang diprioritaskan/diusulkan melalui musrenbang Desa didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender <p>Dari data tersebut di atas, isu-isu yang berkembang antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aksesibilitas dalam Musrenbang relative terbatas• Partisipasi dalam Musrenbang kecamatan relative terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki• Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas

	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya • Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang <p>Faktor internal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kelurahan kurang memahami konsep gender • Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat <p>Faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waktu pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasanya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksanakan kegiatan rumah tangga • Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan.
Rencana Tindaklanjut	Sub Kegiatan
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender
	Rencana Tindaklanjut
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran
	SDM
	Peralatan dan Mesin

		Laptop Soundsystem
Output	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam Musrenbang <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 Lembaga ▪ 14 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 	
Immediate Outcome (Kegiatan)	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Target Kinerja:</p> <p>100%</p>	
Intermediately Outcome (Program)	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan</p> <p>Target Kinerja:</p> <p>100%</p>	
Ultimate Outcome (Sasaran)	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan</p> <p>Target Kinerja:</p> <p>88</p>	
Impact (Tujuan)	<p>Indikator Kinerja : Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>88</p>	

